

# Goblog

## Turunkan Angka Stunting di NTB, Wagub NTB Upayakan Pro Aktif dan Kualitas Posyandu

Syafruddin Adi - [NTB.GOBLOG.CO.ID](http://NTB.GOBLOG.CO.ID)

Mar 2, 2023 - 08:00



Mataram NTB - Untuk percepatan menurunkan angka Stunting di NTB harus diupayakan agar seluruh Posyandu yang ada di 10 Kabupaten/kota agar Pro Aktif dan disiapkan agar berkualitas sehingga diharapkan mampu memberikan

edukasi kepada masyarakat secara masif

Hal ini dikatakan Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah usai menghadiri Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota Bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendagri) yang digelar secara daring dan diikuti Wagub di Ruang Rapat Anggrek Kantor Gubernur NTB, pada Selasa 28 Februari 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Umami Rohmi sapaan Wagub, menjelaskan Provinsi NTB sedang semangat-semangatnya menurunkan angka stunting. Pemrov NTB terus mendorong agar Posyandu Keluarga, yang ada di Kabupaten dan Kota se-NTB, untuk lebih aktif dan berkualitas. Aktif dan berkualitasnya Posyandu Keluarga yang ada di NTB, dapat menyumbang data real, by name by adress, yang dapat menjadi pintu utama untuk menuntaskan masalah stunting.

"Kami terus berupaya bagaimana membuat posyandu keluarga aktif dan berkualitas," jelas Umami Rohmi.

Upaya tersebut, tambahnya, berupa perbaikan berbagai fasilitas yang ada di Posyandu. Seperti timbangan dan pengukur badan yang lebih akurat. Serta, kualitas dan kesejahteraan para kader di Posyandu terus diperhatikan.

Sementara itu, terkait kemiskinan ekstrem di NTB, Wagub menjelaskan, pada Maret Tahun 2022 sebesar 3,29% atau 176.003 jiwa. Yang mana terjadi penurunan angka kemiskinan ekstrem di NTB dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 4,78% atau 252.048 jiwa.

Sama seperti upaya menurunkan stunting, data yang tepat dan akurat menjadi kunci penurunan angka Kemiskinan Ekstrem yang ada di NTB, jelas Wagub. Oleh karena itu, Pemrov NTB terus berupaya untuk turun ke Kabupaten dan Kota demi memvalidasi data kemiskinan yang ada. Sehingga penanganan yang diberikan bisa tepat sasaran. (Adb)